

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN NEGARA

Nandang Ihwanudin, Dena Febriani
STAI Siliwangi Bandung
email: nandangihwanudin.ekis@gmail.com

Abstract : In making payments using money as a medium of exchange, public economic transactions. Certain countries have different types and names of currencies in their payment instruments. The affects the value in different currencies in a country. Likewise, Indonesia uses the rupiah currency; Bath is the official currency in Thailand, the US dollar in the United States, and the ringgit are the official currencies in Malaysia. In the case of international trade-related to other countries, the open economic cycle is buying and selling goods/services between residents. Different payment instruments or types of currency in a country are certain things that need to consider in the value equation or currency. The price for currency exchange determines the similarity in value and currency, namely the exchange rate for foreign currency exchange with domestic currency. The exchange rate is related to a country's monetary international economic policy. The exchange rate affects the wheels of the country's economic progress. Exchange rate stability in the economic reform policy has become one of the state policies. Determination of the state in exchange rate renewal by assessing the economic development of another country is an analysis of the relationship between exchange rate changes in a country.

Keywords : Economy, exchange rate, goverman

Abstrak : Transaksi perekonomian masyarakat dalam melakukan pembayaran menggunakan uang sebagai alat tukar. Suatu negara tentu memiliki jenis dan nama mata uang yang berbeda dalam alat pembayarannya. Hal tersebut mempengaruhi nilai dalam mata uang yang berbeda dalam suatu negara. Sepertihalnya Indonesia yang menggunakan mata uang rupiah, Bath mata uang yang resmi di Thailand, Dolar Amerika di Amerika Serikat dan ringgit merupakan mata uang yang resmi di Malaysia. Perputaran perekonomian terbuka dalam halnya perdagangan internasional yang berhubungan dengan negara lain terdapat transaksi jual beli barang/jasa antar penduduk di negara. Alat pembayaran atau jenis mata uang yang berbeda dalam suatu negara tentu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam persamaan nilai atau mata uang. Kesamaan nilai dan mata uang ditetapkan dengan harga untuk penukaran uang tersebut yaitu nilai tukar untuk penukaran mata uang asing dengan mata uang dalam negeri. Nilai tukar yang bisa disebut dengan kurs adanya keterikatan dengan kebijakan perekonomian internasional moneter suatu negara. Hal tersebut mempengaruhi roda perjalan kemajuan perekonomian negara. Kestabilan nilai tukar dalam kebijakan pembaharuan ekonomi meningkat menjadi salah satu kebijakan negara. Penentuan negara dalam pembaharuan nilai tukar dengan menilai perkembangan perekonomian dari suatu negara lain merupakan suatu analisis terhadap hubungan perubahan nilai tukar yang mesti ditetapkan dalam suatu negara.

Kata Kunci : Ekonomi, Nilai tukar, Kebijakan negara

A. PENDAHULUAN

Ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipastikan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. (Suseno, 2002) Penggunaan suatu mata uang, semula hanyalah didasarkan pada kesepakatan dari masyarakat yang mempergunakan. Namun, dalam masyarakat modern penggunaan suatu mata uang pada umumnya diatur dengan Undang-Undang. Misalnya Rupiah merupakan mata uang yang berlaku di Indonesia dan ditur dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia; Ringgit merupakan mata uang yang resmi di Malaysia, Bath mata uang yang resmi di Thailand, Dolar Amerika di Amerika Serikat dan Yen Jepang.

Semua permasalahan yang berkaitan dengan mata uang suatu negara dengan negara lainnya tersebut biasanya dikenal dengan permasalahan nilai tukar. Nilai tukar mulai muncul sejak terjadinya transaksi jual beli barang/jasa antar penduduk di negara berbeda yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Penggunaan mata uang penduduk negara lain

dilakukan pada saat penduduk suatu negara melakukan pembelian barang/jasa dari negara lain. Sementara di sisi negara penjual akan menerima mata uang yang diterima dari negara pembeli tersebut, baik dalam bentuk mata uang negara bersangkutan atau mata uang negara lainnya yang sudah disepakati sebagai mata uang internasional. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang antarnegara yang melakukan transaksi perdagangan. (Syarifudin, 2015)

Kebijakan negara tentu berperan dalam pembaruan nilai tukar untuk menghadapi perkonomian global. Analisis terhadap perkembangan perkonomian suatu negara dan perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dalam negeri dan ke luar negeri. Sebagaimana negara-negara lainnya, tujuan utama kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Stabilitas nilai tukar dapat

mendorong stabilitas harga khususnya stabilitas harga barang-barang yang berasal dari impor.

B. PEMBAHASAN

1. Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.

Dalam transaksi perdagangan internasional, suatu negara tidak hanya melakukan transaksi pada satu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Dengan demikian, pengukuran nilai tukar riil suatu negara terhadap mitra dagangnya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif.

Nilai tukar mulai muncul sejak terjadinya transaksi jual beli barang/jasa antarpenduduk di negara berbeda yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Penggunaan mata uang penduduk negara lain dilakukan pada saat penduduk suatu negara melakukan pembelian barang/jasa dari negara lain. Sementara di sisi negara penjual akan menerima mata uang yang diterima dari negara pembeli tersebut, baik dalam bentuk mata uang negara bersangkutan atau mata uang negara lainnya yang sudah disepakati sebagai mata uang internasional. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang antarnegara yang melakukan transaksi perdagangan. (Syarifudin, 2015)

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing. Sementara dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar atau Kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik. Setiap perubahan dalam penawaran dan permintaan dari suatu mata uang akan mempengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan.

Dalam hal permintaan terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai mata uang domestik akan menurun.

Sebaliknya jika permintaan terhadap valuta asing menurun, maka nilai mata uang domestik meningkat. Sementara itu, jika penawaran valuta asing meningkat relatif terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun, maka nilai tukar mata uang domestik menurun. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing: (Suseno, 2002)

- a. Faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar
- b. Faktor aliran modal keluar (*capital outflow*). Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri.
- c. kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulasi maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.

Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama. *Pertama*, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi. *Kedua*, faktor aliran modal masuk (*capital inflow*). Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (*Portfolio investment*) dan investasi langsung pihak asing (*foreign direct investment*). (Suseno, 2002)

Faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dalam negeri dan ke luar

negeri. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perkembangan ekspor dan impor antara lain dipengaruhi oleh harga relatif antara suatu negara dengan negara mitra dagangnya. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya, maka harga barang ekspor suatu negara akan lebih mahal dan dapat menurunkan ekspor serta pada lanjutannya akan menurunkan nilai tukar suatu negara.

Besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri (interest rate differential). Semakin tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga luar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu negara. Namun, dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi suku bunga riil. Dalam suku bunga riil tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat resiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Negara yang mempunyai resiko penanaman yang tinggi, pada umumnya cenderung dihindari investor.

3. Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia

Hubungan perdagangan di Indonesia tentu tidak berpacu pada penjualan ekspor namun berhubungan dengan impor yang mana adanya hubungan pertukaran alat transaksi dari negara lain dengan negara Indonesia yaitu nilai tukar rupiah. Sebagaimana negara-negara lainnya, tujuan utama kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Stabilitas nilai tukar dapat mendorong stabilitas harga khususnya stabilitas harga barang-barang yang berasal dari impor. Depresiasi nilai tukar yang terlalu besar dapat mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal dan secara keseluruhan laju inflasi dapat meningkat. Selanjutnya, inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan kegiatan ekonomi.

Tujuan kebijakan nilai tukar lainnya yang tidak kalah penting adalah mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan neraca perdagangan. Menjaga keseimbangan nilai tukar dalam rangka mendukung neraca perdagangan perlu dipelihara karena nilai tukar yang over-valued dapat mengakibatkan neraca perdagangan menjadi memburuk dan merugikan perekonomian nasional.

Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya. (Adiningsih; dkk., 1998) Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi. Menurunnya kurs Rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dolar AS memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. (Sitinjak dan Kurniasari, 2003)

a. Faktor Pergerakan Nilai Tukar

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu (Madura, Jeff. 1999):

1) Faktor Fundamental

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar dan intervensi Bank Sentral.

2) Faktor Teknis, Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valas akan naik dan sebaliknya.

3) Sentimen Pasar

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

b. Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu:

1) Sistem kurs tetap (1970- 1978) Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi Rp. 250/US\$, sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US\$. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.

2) Sistem mengambang terkendali (1978-Juli 1997) Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan

sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi (pembatas) dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari spread.

- 3) Sistem kurs mengambang (14 Agustus 1997-sekarang) Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US\$ semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi (sistem nilai tukar mengambang terkendali) dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*) pada tanggal 14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri.

4. Perkembangan Nilai Tukar Sistem Moneter Internasional

Dalam sejarah sistem moneter internasional, penentuan dan sistem nilai tukar negara mempunyai evolusi yang panjang. Pada awal sistem moneter internasional pada abad ke 19 beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan mengacu pada standar emas (*Gold Standard*). Sistem ini juga mengalami pasang surut sehingga muncul sistem nilai tukar dengan mengacu pada kesepakatan *Bretton Woods*. Sistem ini juga tidak mampu bertahan lama sehingga sejak tahun 1970-an, setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sistem nilai tukar yang digunakan. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sistem nilai tukar yang digunakan suatu negara tidak hanya terbatas pada sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), tetapi juga sistem nilai tukar mengambang (*Flexible exchange rate*) atau variasi dari kedua sistem tersebut. Selain itu, perkembangan terakhir yang tidak kalah menariknya adalah pembentukan mata uang bersama dari anggota *European Monetary Union* pada tahun 1999 dan diberlakukan penuh pada tahun 2002.

Gosh, Gulde dan Wolf (2002) mengelompokkan sejarah sistem moneter internasional atas enam periode, yaitu: 1) periode standar emas (*Gold Standard*), 2) periode dismal (*Dismal Period*), 3) periode standar tukar emas (*Gold Exchange Standard*), 4) periode nasionalisme moneter (*Monetary Nationalism*), 5) periode sistem

Bretton Woods (Bretton Woods System), 6) periode setelah *Bretton Woods (Post-Bretton Woods Period)*. Namun, terdapat penulis yang mengelompokkan periode 2), 3), dan 4) menjadi satu periode, sehingga periode sistem moneter internasional dapat dibagi empat periode, yaitu 1) periode standar emas (*Gold Standard*), 2) periode perang dunia pertama dan kedua, 3) periode sistem *Bretton Woods (Bretton Woods System)*, dan 4) periode setelah *Bretton Woods (Post-Bretton Woods Period)* (Copeland, 1989).

a. Periode Standar Emas: 1880-1914

Pada sistem standar emas, nilai tukar uang domestik terhadap emas ditetapkan berdasarkan harga resmi yang tetap. Terdapat dua karakteristik utama standar emas yang diterapkan oleh negara-negara yang menggunakan standar ini pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu: 1) perorangan dapat dengan bebas mengimpor dan mengekspor emas dan 2) persediaan dan uang kertas yang beredar cukup dijamin dengan persediaan emas. Kebebasan perorangan untuk membeli dan menjual emas di dalam negeri atau dari/ke luar negeri mempunyai implikasi bahwa antarnegara menganut sistem nilai tukar tetap (*Fixed exchange rate system*).

Penggunaan standar emas ini berakhir pada perang dunia pertama. Perang telah merusak arus perdagangan dan mobilitas emas antarnegara sehingga standar ini tidak dapat dipertahankan. Selain itu, besarnya kebutuhan pembiayaan untuk perang pada negara-negara yang terlibat perang, seperti Perancis, mendorong pemerintah mencetak uang lebih banyak sehingga uang tersebut tidak sepenuhnya lagi dapat dijamin dengan cadangan emas nasional.

b. Periode Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua

Pada periode Perang Dunia Pertama (PD I) hingga Perang Dunia Kedua (PD II), sistem moneter atau nilai tukar yang digunakan suatu negara mengalami pasang surut. Pada periode PD I hingga tahun 1925, banyak negara menggunakan sistem nilai tukar mengambang dengan tidak ada intervensi dari bank sentral. Sementara dari tahun 1925 hingga tahun 1931, sejalan dengan perbaikan standar emas, banyak negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan mengaitkan cadangan emas dan valuta asing yang dimiliki atau sering disebut *gold exchange standard*. Pada masa depresi (*Great Depression*) banyak negara menanggalkan standar emas dan menggunakan sistem nilai tukar

mengambang bebas atau sistem mengambang terkendali.

c. Sistem Bretton Woods

Pemerintah Inggris dan Amerika pada awal tahun 1940-an mulai membentuk suatu tim yang terdiri dari pejabat pemerintah, akademisi, dan para pakar dengan tugas untuk meneliti, menjajagi, dan mulai memikirkan aturan main serta kelembagaan yang tepat untuk mewujudkan pemikiran tersebut setelah selesainya perang.

Untuk mewujudkan pemikiran tersebut pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, telah diselenggarakan suatu konferensi yang diikuti oleh 44 negara. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada Desember 1946 ditetapkan secara resmi suatu tatanan moneter internasional yang baru. Satu keputusan yang terpenting adalah berupa penetapan sistem nilai tukar tetap yang secara resmi diikuti oleh 32 negara.

d. Pascasistem Bretton Woods

Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem nilai tukar tetap yang diatur IMF berdasarkan pertemuan di Bretton Woods semakin berkurang. Ketidakpercayaan tersebut mendorong ambuknya sistem nilai tukar Bretton Woods, seperti tercermin dari penutupan penukaran USD terhadap emas pada 15 Agustus 1971. Kebijakan tersebut juga ditindaklanjuti dengan mendevalusi mata uang dolar Amerika dari 35 USD menjadi 38 USD per satu ounce emas. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka sejak tahun 1973, negara-negara anggota IMF diperbolehkan untuk mengambang nilai tukar mata uangnya. Perubahan tersebut tidak menyebabkan semua negara beralih ke sistem nilai tukar mengambang, melainkan banyak juga ditemukan negara menganut sistem nilai tukar tetap ataupun variasi dari kedua jenis sistem nilai tukar mengambang dan sistem nilai tukar tetap.

Sejalan dengan perkembangan tersebut maka nilai mata uang suatu negara juga sangat dipengaruhi aliran modal antarnegara dan kegiatan spekulasi. Kebijakan dalam penentuan nilai tukar yang terjadi adanya analisis dalam suatu perkembangan yang dipakai negara pada saat itu. Analisisnya dengan perkembangan global maka negara-negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap atau dengan variasinya sangat rentan terhadap arus balik modal dan kegiatan spekulasi. Krisis nilai tukar ini tidak hanya mengakibatkan harga-harga membumbung tinggi, tetapi juga mengakibatkan kontraksi perekonomian yang cukup dalam. Melemahnya nilai tukar mengakibatkan barang-barang impor, seperti bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi

lebih mahal dan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga barang di dalam negeri. Selain itu, melemahnya nilai tukar mengakibatkan semakin besarnya kewajiban hutang luar negeri perusahaan-perusahaan sehingga neraca perusahaan dan bank-bank memburuk.

5. Sistem Nilai Tukar/Kurs Yang Berlaku di Perekonomian Internasional

Menurut Kuncoro (2001) ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu:

- a. Sistem kurs mengambang (floating exchange rate), sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu:
 - 1) Mengambang bebas (murni) dimana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini sering disebut clean floating exchange rate, di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs.
 - 2) Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchange rate) dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valas untuk mempengaruhi pergerakan kurs.
 - a) Sistem kurs tertambat (pegged exchange rate). Dalam sistem ini, suatu Negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama "Menambatkan" ke suatu mata uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya.
 - b) Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs). Dalam sistem ini,

suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodic dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam.

- c) Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam "keranjang" umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda.
- d) Sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Dalam sistem ini, suatu Negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit.

e. Kebijakan dan Sistem Nilai Tukar

Pada umumnya, kebijakan nilai tukar suatu negara diarahkan untuk mendukung neraca pembayaran dan/atau membantu efektivitas kebijakan moneter. Penetapan nilai tukar yang overvalue dapat mengakibatkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri

dan barang-barang impor menjadi lebih murah dan akhirnya neraca perdagangan menjadi memburuk.

Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi sehingga dapat mengganggu tujuan akhir kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas harga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan nilai tukar yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara.

Perubahan nilai tukar yang sangat cepat dan tidak stabil diyakini akan mengganggu kestabilan kegiatan perdagangan internasional dan berimbas pada pelarian modal internasional. Kondisi ini pada akhirnya akan mengganggu kinerja sektor riil domestik, baik perdagangan, produksi, dan stabilitas harga domestik. Pada puncaknya, hal ini akan mengganggu iklim bisnis sehingga berpotensi membahayakan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depan. Oleh karena itu, upaya bersama menjaga stabilitas nilai tukar, baik oleh otoritas moneter maupun pelaku pasar keuangan, adalah mutlak diperlukan. (Ferry Syarifudin, 2015)

Dalam menerapkan tata kelola yang baik, kebijakan nilai tukar otoritas moneter harus konsisten mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti menjaga kestabilan nilai tukar jangka pendek, mengarahkan nilai tukar sesuai target inflasi menengah dan panjang, serta mendukung competitiveness dengan negara peer. Di beberapa negara lain, kebijakan nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian domestik. Pada prinsipnya, kebijakan nilai tukar yang dilakukan oleh otoritas moneter adalah untuk mendukung kepentingan ekonomi domestik.

C. PENUTUP

Perkembangan nilai tukar dalam sejarah sistem moneter internasional, penentuan dan sistem nilai tukar negara mempunyai evolusi yang panjang. Pada awal sistem moneter internasional pada abad ke 19 beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan mengacu pada standar emas (*Gold Standard*). Sistem ini juga mengalami pasang surut sehingga muncul sistem nilai tukar dengan mengacu pada kesepakatan *Bretton Woods*. Sistem ini juga tidak mampu bertahan lama sehingga sejak tahun 1970-an, setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sistem nilai tukar yang digunakan. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sistem nilai tukar yang digunakan suatu negara tidak hanya terbatas pada sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), tetapi juga sistem nilai tukar mengambang (*flexible exchange rate*) atau variasi dari kedua sistem tersebut. Selain itu,

perkembangan terakhir yang tidak kalah menariknya adalah pembentukan mata uang bersama dari anggota European Monetary Union pada tahun 1999 dan diberlakukan penuh pada tahun 2002.

Alat tukar sebagai alat kebijakan negara merupakan suatu analisis yang bertujuan mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan neraca perdagangan. Menjaga keseimbangan nilai tukar dalam rangka mendukung neraca perdagangan perlu dipelihara karena nilai tukar yang over-valued dapat mengakibatkan neraca perdagangan menjadi memburuk dan merugikan perekonomian nasional. Dalam menerapkan tata kelola yang baik, kebijakan nilai tukar otoritas moneter harus konsisten mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti menjaga kestabilan nilai tukar jangka pendek, mengarahkan nilai tukar sesuai target inflasi menengah dan panjang, serta mendukung competitiveness dengan negara peer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, sri dkk. 1998, *Perangkat Analisis dan Teknik Analisis di Pasar Modal Indonesia*: PT.Bursa Efek Jakarta
- Ferry Syarifudin, 2015, *Konsep, Dinamika Dan Respon Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia*, Jakarta : BI Institut
- Iskandar Simorangkir Suseno, Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan: Bank Indonesia
- Kuncoro, Mudrajad, 2001. *Manajemen Keuangan Internasional : Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*. BPFE: Yogyakarta
- Madura, Jeff. 199, *Financial Management*, Florida University Express.
- Sitinjak, E.L.M, dan Widuri Kurniasari, 2003. *Indikator-indikator Pasar Saham dan Pasar Uang yang Saling berkaitan ditinjau Dari Pasar Saham Seddang Bullish dan Bearish*” Jurnal Riset Ekonomi vol.3 no.3 September.
- Solikin Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Buku Seri Kebanksentralan No. 1, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia 2002